

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dan merupakan negara kepulauan terluas dan terbanyak jumlah pulaunya di dunia, terbentang sepanjang lebih dari 5000 km. Dari segi etnis, bangsa Indonesia merupakan kumpulan lebih dari 900 kelompok etnis dengan berbagai identitas kulturalnya masing-masing, dengan lebih dari 300 kelompok bahasa daerah.

Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat keempat setelah Amerika Serikat. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Negara Indonesia. Apabila pertumbuhan penduduk terus bertambah, sementara laju pertumbuhan ekonomi berjalan lamban, maka negara tersebut akan semakin bertambah miskin dan akan mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial budaya masyarakat.

Malthus (Widiyanti 2000 : 2) meramalkan bahwa nantinya umat manusia akan hidup sengsara, disebabkan karena penyediaan bahan makanan tidak dapat mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, sehingga manusia selalu dalam keadaan kekurangan makan dengan aneka ragam akses. Sehingga hal ini perlu adanya solusi untuk mencapai pembangunan dan perubahan dalam ruang lingkup nasional yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui kebijakan, strategi dan rencana.

Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan sering kali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi menjadi salah satu pembangunan yang hingga saat ini masih dalam keadaan tidak stabil, dimana salah satu penyebabnya adalah padatnya jumlah penduduk tersebut. Kepadatan penduduk akan menyebabkan terjadinya pengangguran yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah, menyebabkan mereka bisa saja bertindak kriminal dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kepadatan penduduk adalah masalah yang harus segera ditangani dengan serius oleh pihak-pihak yang terkait karena apabila permasalahan ini terus berlanjut akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sosial budaya dalam lingkungan masyarakat. Salah satu solusi pemerintah untuk menghindari ledakan penduduk ialah dengan melakukan program transmigrasi penduduk.

Sejarah transmigrasi di Indonesia telah mencapai satu abad lamanya. Dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1905 pada masa penjajahan Hindia Belanda. Peningkatan jumlah penduduk di pulau Jawa tersebut menyebabkan Pemerintahan kolonial Belanda mencari suatu cara untuk dapat mengatasi peningkatan penduduk yang terjadi di pulau Jawa ini dengan memindahkan penduduk secara besar-besaran dari pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih jarang, dengan efisiensi yang tinggi dan biaya yang dapat ditanggung oleh Negara. Program transmigrasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan nama kolonisasi pertanian. Pada masa itu, secara tidak langsung pemerintahan

kolonial Belanda telah menerapkan pola transmigrasi sebelum Indonesia mengadopsi program perpindahan penduduk ini. Pemerintahan kolonial Belanda membawa banyak orang pribumi (terutama suku Jawa) untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Orang-orang pribumi tersebut awalnya dipekerjakan sebagai pembantu dan pelayan, atau tukang kebun bagi orang-orang Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata ulang sistem kolonisasi yang dibangun oleh Belanda. Indonesia tidak lagi menggunakan nama kolonisasi pertanian melainkan di ganti dengan nama transmigrasi. Hal ini, bertujuan untuk menghilangkan bayang-bayang pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selama pemerintahannya dikenal dengan kekejaman. Perbaikan-perbaikan sistem antara lain dari tata cara pemindahan sarana dan prasarana yang di dapat di daerah tujuan, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada para transmigran, serta jaminan kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan transmigrasi. Jaminan yang diberikan salah satunya adalah setiap kepala keluarga (KK) diberikan unit rumah layak huni serta sawah/ladang sebagai tempat untuk mencari penghidupan.

Penyelenggaraan transmigrasi menurut undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ke transmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang

ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Program yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan apalagi dalam mengatasi masalah perekonomian adalah transmigrasi . Tujuan utama transmigrasi sesuai dengan pengertiannya ada dalam rangka penyebaran penduduk yang merata di seluruh wilayah Indonesia, selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sector informal, mengembangkan potensi sumber daya alam. Transmigrasi pada dasarnya pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan yang tidak sekedar memindahkan penduduk ditempat yang baru, namun kualitas hidup penduduk yang ditinggalkan itu perlu ditingkatkan. Mereka harus memperoleh pelayanan pelayanan yang pantas untuk memenuhi kebutuhannya, baik dibidang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas keagamaan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lain.

Ikut transmigrasi dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat yang melakukan program tersebut, Hal ini dikarenakan pentingnya perubahan perekonomian yang harus dilakukan guna menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kesempatan itu sangat terbentang luas dihadapan mereka yang ikut program ini karena mereka mencoba pemukiman baru dan mencoba suasana baru. Bagi seorang petani yang tinggal di pedesaan meninggalkan sistem sosial lama

dan pindah ke sistem sosial yang baru dan lingkungan baru yang umumnya keadaannya belum mereka ketahui merupakan sesuatu yang berat.

Pembangunan transmigrasi merupakan tumpuan harapan bagi berbagai pihak, tidak lagi menjadi tumpuan bagi petani kecil saja. Berbaurnya berbagai etnis suku bangsa dalam suatu pemukiman transmigrasi yang menyatu dalam lingkungan desa jika dikelola dengan baik justru akan mampu menjadi wahana pembentuk karakter bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Adanya transmigrasi ini didorong oleh faktor menyempitnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian di daerah asal. Sedangkan di daerah tujuan, lahannya luas, subur, mudah diolah dan relatif murah. Selain itu, faktor pendukung adanya transmigrasi adalah karena usaha yang dilakukan diluar sektor pertanian tidak dapat memperbaiki kehidupannya karena tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan hal tersebut mendorong mereka untuk berpindah dari daerahnya. Salah satu daerah tujuan dari transmigrasi tersebut yaitu daerah Gorontalo.

Pada umumnya, daerah yang ditetapkan sebagai tujuan transmigrasi ialah daerah baru dengan kondisi lapangan yang relatif berat serta daya dukung lahan yang relatif rendah. Sebagai daerah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman baru, banyak hal yang perlu diperhatikan seperti sarana, prasarana dan potensinya, tentunya membutuhkan kajian mendalam agar dapat dibangun menjadi pusat perkembangan baru bagi kehidupan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Tantangan utama dalam pembangunan masyarakat di daerah transmigrasi ialah bagaimana memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pendatang baru, maupun masyarakat setempat, baik berupa keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, maupun potensi alam serta kondisi lingkungan. Pembangunan di daerah transmigrasi dilakukan dengan membuka dan memanfaatkan suatu kawasan yang cukup luas, sebagian besar sebelumnya merupakan kawasan hutan yang harus dikonversi terlebih dahulu agar menjadi kawasan budi daya seperti halnya di daerah Gorontalo.

Daerah Gorontalo merupakan wilayah transmigrasi yang sudah dimulai sebelum terbentuknya provinsi Gorontalo yang memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Dimana pada waktu itu Provinsi Gorontalo mendeklarasikan pemisahannya dari Provinsi SULUT tepatnya pada tanggal 23 Januari bertepatan dengan hari patriotik, pada bulan Februari Provinsi Gorontalo telah mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari Provinsi SULUT. Dengan kata lain, Provinsi Gorontalo baru 11 tahun berdiri sendiri. Oleh karena jumlah penduduk Gorontalo belum terlalu padat dan sumber daya alamnya masih banyak yang belum dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah mentransmigrasikan masyarakat yang terlalu padat penduduknya ke Gorontalo.

Provinsi Gorontalo dianggap sangat layak sebagai wilayah transmigrasi, hal ini dipengaruhi oleh adanya jumlah penduduk Gorontalo yang belum terlalu padat dan sumber daya alamnya masih banyak yang belum dikelola oleh masyarakat Gorontalo itu sendiri. Adapaun yang menjadi sasaran dalam menempatkan

masyarakat transmigrasi ini yakni di Desa Dimito Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo.

Transmigrasi di Desa Dimito merupakan pembauran dari berbagai etnis, seperti Lombok, Jawa, Gorontalo, Minahasa dan Ambon, kelompok etnis ini memiliki kebudayaan yang berbeda, batas-batas sosial dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka ditengah-tengah kultural masyarakat.

Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi, dan kondisi saat ini sekitar 278 jiwa penduduknya adalah transmigran Lombok. Sehingga hal ini merupakan suatu bentuk perjuangan Etnis Lombok untuk mempertahankan kehidupan ekonomi sosial budayanya ditengah lingkungan yang majemuk.

Rasa tidak ingin meninggalkan kampung halaman selalu menjadi polemik bagi Etnis Lombok, karena mereka tidak ada pekerjaan lain sehingga mereka tetap berkeinginan untuk merubah nasib didaerah tujuan transmigrasi karena yang muncul dalam program ini dilakukan untuk mengubah hidupnya sendiri dan mencari lahan yang baru. Hal ini diibaratkan seperti orang yang ingin terjun kemedan peperangan melawan perasaan rindu akan tanah kelahiran.

Penduduk yang bertransmigrasi berharap bisa merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, akan tetapi juga dalam aspek sosial budaya.

Dua tahun lamanya peneliti berada di wilayah transmigrasi khususnya di desa Dimito dan menemukan sebuah keunikan sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan formulasi judul **“Kehidupan Etnis Lombok Diwilayah Transmigrasi”** suatu Penelitian di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan ekonomi Etnis Lombok di desa Dimito ?
2. Bagaimana hubungan sosial Etnis Lombok di desa Dimito ?
3. Bagaimana keadaan budaya Etnis Lombok di desa Dimito ?

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu “ Bagaimana kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Etnis Lombok di Desa Dimito ?”

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kehidupan sosial Etnis Lombok di Desa Dimito.
2. Untuk mengetahui Perkembangan ekonomi Etnis Lombok di Desa Dimito.

3. Untuk mengetahui keadaan budaya Etnis Lombok di desa Dimito.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dua manfaat yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sebagai pembanding bagi para peneliti serta peminat.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sekitar kita.
2. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman ataupun pengetahuan tentang penelitian sebagai realisasi tanggung jawab mahasiswa terhadap darma perguruan tinggi khususnya darma penelitian .
3. Sebagai bahan referensi selanjutnya.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo, penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Wonosari untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun daerahnya guna untuk kepentingan bersama khususnya pada masyarakat.

